

Judul : Pembahasan RUU P2SK - DPR Dorong Industri Keuangan Produktif Berpihak ke Rakyat
Tanggal : Senin, 26 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pembahasan RUU P2SK DPR Dorong Industri Keuangan Produktif Berpihak Ke Rakyat



Puteri Anetta Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendorong industri keuangan yang produktif, terpercaya, dan berpihak kepada masyarakat. Hal itu selaras dengan segera dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) inisiatif Komisi XI DPR, yang telah diputuskan sebagai RUU Usulan DPR, dalam Rapat Paripurna DPR ke-5, Selasa (20/9).

Pasca-persetujuan tersebut, RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk segera dilakukan pembahasan.

“Sektor keuangan kita terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti pandemi Covid-19 maupun percepatan transformasi digital. Sehingga, landasan hukumnya pun perlu semakin diperkuat untuk memastikan industri ini dapat semakin resilien di tengah dinamika

pasar saat ini,” ungkap Puteri, kemarin.

Puteri pun menyampaikan sejumlah pandangan untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar semakin efisien, inklusif dan aman.

“Dari segi kelembagaan, RUU ini perlu mengatur mekanisme koordinasi antar-lembaga, subsektor, dan *stakeholder* terkait. Serta, semakin memperkuat pembagian kewenangan, tugas dan fungsi, serta koordinasi antar-otoritas dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Sehingga diharapkan kinerja lintas otoritas dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Puteri.

Politisi Partai Golkar itu juga menekankan agar RUU P2SK sejalan dengan napas pengembangan iklim investasi dan berusaha di Indonesia sesuai dengan beberapa UU terkait. Seperti UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Untuk menghadapi transformasi digital saat ini, maka RUU P2SK harus menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan industri teknologi finansial (*fintech*) yang *forward-looking*, antisipatif, dan mengutamakan keamanan data pribadi konsumen. Tentu dengan tetap memberikan ruang gerak bagi industri untuk mengembangkan teknologinya demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. ■ KAL